

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang hakekatnya adalah mempercepat kesejahteraan petani, dengan mengacu pada pendapat Edward III, Penulis menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam Aspek Meningkatkan Kerja Sama Dan Keterlibatan Instansi Terkait.

Pengetahuan atas apa yang dikerjakan dengan komunikasi berjalan dengan baik, sehingga dalam Implementasi Program Revolusi Pertanian Malaka, keputusan kebijakan pada implementasinya dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Terlihat adanya komunikasi dalam aspek meningkatkan kerja sama dan keterlibatan yang dilakukan instansi terkait dalam hal ini pemerintah terhadap masyarakat selaku warga tani.

2. Sumber Daya Dalam Aspek Peningkatan Sarana Pertanian

Dalam mendorong masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategis untuk mencapai suatu keberlanjutan, peningkatan sarana pertanian melalui Program RPM pemerintaah konsentrasi mengurus sejumlah kebutuhan petani sawah seperti, adanya pemanfaatan lahan pertanian yang dimiliki masyarakat dalam tiap kecamatan yang ada pada kabupaten Malaka, penambahan

jumlah alsintan (traktor), Penyediaan Benih Unggul, Pupuk, Obat Obatan dan Pendampingan.

3. Disposisi dalam aspek Peningkatan Produksi dan Produktifitas Komoditas RPM

Dalam mengubah perilaku petani dengan pendidikan non formal agar mempunyai kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai teknik budidaya tanaman diterapkan dalam implementasinya, melalui peningkatan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan sikap petani dan penyuluhan melalui pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) Cross visit, magang dan studi banding, penyediaan informasi perubahan cuaca dan iklim terkait waktu tanam, serta petani didorong untuk membentuk lembaga persamaan bersama.

4. Struktur birokrasi dalam aspek Meningkatkan Kerja Sama Dan Keterlibatan Instansi Terkait

Terlihat adanya pembagian tugas yang sesuai dalam tahapan program yang dilaksanakan, guna mendukung terwujudnya swasembada pangan dan mensukseskan program RPM.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program revolusi pertanian di Kabupaten Malaka bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang hakekatnya adalah

mempercepat kesejahteraan petani, responsivitas pemerintah Kabupaten Malaka dalam implementasi kebijakan Program Revolusi Pertanian Malaka, menunjukkan bahwa kepedulian dan daya tanggap pemerintah berupa dukungan aparatur dan masyarakat terhadap semua tahapan program yang dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Malaka dalam mengefektifkan komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya dan struktur birokrasi agar lebih fleksibel dan tidak birokratis dalam implementasi kebijakan revolusi pertanian malaka, kebijakan tersebut perlu dilanjutkan dimasa yang akan datang dengan tetap mempertahankan kebijakan tersebut ditahun yang akan mendatang.

B. Saran

Dalam Implementasi Program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) di Kabupaten Malaka, penulis menyarankan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Malaka : perlunya pemberian arahan yang lebih sebagai bagian peningkatan keterampilan kepada petani dalam mengoperasikan alsintan.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Malaka : perlunya peningkatan intensitas pendampingan oleh *Petugas Penyuluhan Lapangan* (PPL) agar dalam implementasinya, Program Revolusi Pertanian Malaka dapat berlangsung lebih lama lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III George C.1980 *implementing public police*. Washington DC congressional Queaterly press.
- Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana kerja sama Pemerintah Kabupaten Malaka. (2016). *Grand Design One Village One Product Jalan Menuju Revolusi Pertanian Malaka*.
- Kario, N. H., & Fakhrina. (2016). *Kajian Daya Dukung Usahatani Sawah Terhadap Kecukupan Beras di Nusa Tenggara Timur*. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian, Banjarbaru, 20 Juli 2016.
- . Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2017). *Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016*
- Van meter dan Van Horn dalam Agustino 2006 *Dasar-Dasar kebijakan public*. Bandung: alfabeta.
- Syukur abdullah M. 1988 *Perkembangan dan penerapan studi implementasi* Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.
- Merilee S. Grindle 1980. *Politics and policy implementation in the third word*. New jersy : Princeton university press.
- Utomo, Setyo. (2017). *Simpul Perencana Volume 29: Nawacita. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas*, Jakarta2017.
- Jones Charles O 1996 *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)* Terjemahan Ricky ismanto Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sugiyono 2013 *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, dan R&D.*

Bandung : Alfabeta.

Margono 2014 *Metode penelitian pendidikan.* Jakarta: Rienaka Cipta

Sukmadinata 2012. *Metode penelitian pendidikan Bandung* PT. Remaja

Rosdakarya.

Melong (2007:147). *Metode penelitian kuantitatif. Edisi revisi. Bandung.*

Melong 2007. *Metode penelitian kuantitatif.* Edisi Revisi. Bandung.

Sugiyono 2017. *Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang*

dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampling jenuh. R&D Bandung: Alfabeta.

Sugiyono 2008. *Mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang*

kompleks. R&D Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata 2012. *Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan*

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono 2016. *Teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh*

responden atau data lain terkumpul. R&D Bandung: Alfabeta.